**DISHARMONI HUKUM NORMATIF DAN ESHMPIRIS DALAM
BUDAYA HUKUM PERIZINAN USAHA PASCA OSS**

Ananda Kyara Putri Kusuma¹, Nadia Ayu Pratiwi²
anandakyara01@gmail.com¹, nadiapратиwi1803@gmail.com²

Magister Universitas Trisakti

Abstrak: Penerapan sistem Online Single Submission (OSS) dalam perizinan usaha di Indonesia merupakan langkah strategis untuk menyederhanakan birokrasi dan mendorong iklim investasi. Namun, dalam praktiknya, ditemukan ketidaksesuaian antara norma hukum yang tertulis (hukum normatif) dengan pelaksanaan di lapangan (hukum empiris). Ketidakharmonisan ini mencerminkan permasalahan mendasar dalam budaya hukum perizinan, di mana regulasi yang seharusnya menjadi acuan belum sepenuhnya diinternalisasi oleh para pelaku birokrasi maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk disharmoni tersebut, menganalisis penyebabnya, serta mengevaluasi dampaknya terhadap efektivitas sistem perizinan usaha pasca implementasi OSS. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis, diperoleh temuan bahwa kendala utama terletak pada ketidaksiapan institusi, tumpang tindih regulasi sektoral, dan resistensi terhadap perubahan dalam tatanan budaya hukum lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan hukum yang adaptif serta strategi internalisasi nilai-nilai hukum yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Hukum Normatif, Hukum Empiris, Budaya Hukum, Perizinan Usaha, OSS, Disharmoni Regulasi.

***Abstract:** The implementation of the Online Single Submission (OSS) system in Indonesia aims to streamline business licensing procedures and foster a more conducive investment climate. However, discrepancies between written legal norms (normative law) and actual practices in the field (empirical law) have emerged. This disharmony reflects a deeper issue within the legal culture of business licensing, where regulations intended as guiding frameworks are not fully internalized by both bureaucratic actors and the public. This study seeks to identify the forms of disharmony, analyze their underlying causes, and assess their impact on the effectiveness of the business licensing system following OSS implementation. Using a socio-legal approach, the research finds that major obstacles include institutional unpreparedness, overlapping sectoral regulations, and resistance to change within local legal cultures. Therefore, adaptive legal reform and a more comprehensive internalization of legal values are necessary to align legal norms with on-the-ground practices.*

***Keywords:** Normative Law, Empirical Law, Legal Culture, Business Licensing, OSS, Regulatory Disharmony.*

PENDAHULUAN

Indonesia dalam mengimplementasikan sistem perizinan Online Single Submission atau yang biasa disebut oleh pelaku usaha adalah OSS, OSS dibuat pemerintah sejak tahun 2018 dimana pemerintah berupaya untuk dapat menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha. Sistem ini dirancang untuk dapat menciptakan mekanisme perizinan yang lebih sederhana, efisien, serta bebas dari intervensi koruptif. Jaminan kepastian dan kemudahan berusaha merupakan prasyarat substansial bagi setiap aktivitas investasi.¹

Indonesia pada hari ini, masih terus melakukan dan berupaya menata perizinan sebagai bagian dari reformasi, upaya tersebut diwujudkan dengan hadirnya kebijakan ekonomi sejak September 2015 yang berlandaskan pada deregulasi dan reformasi, tindak lanjut kebijakan tersebut dengan hadirnya Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelayanan Berusaha yang kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Bebas Elektronik (Sistem OSS).² Melalui OSS, pelaku usaha dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha secara daring dalam satu platform terpadu, sehingga mereka tidak perlu mendatangi berbagai instansi secara fisik.³ Sistem ini juga diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan mempermudah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memulai serta menjalankan kegiatan usahanya.⁴

Dalam praktiknya masih sering kali ditemukan berbagai bentuk pungutan liar dalam proses perizinan, karena adanya hambatan dari aspek regulasi dimana adanya disharmoni antara Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Bebas Elektronik (Sistem OSS) dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana hal tersebut menyangkut kewenangan penerbitan izin yang sebelumnya berada di kepala daerah sekarang berpindah ke pemerintah pusat yang dalam hal ini Lembaga OSS atau mungkin Badan Koordinasi Penanaman Modal. Disharmoni ini terjadi karena adanya fungsi Lembaga perizinan yang bermula di delegasikan dari Undang Undang Penanaman Modal menjadi ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disebut PTSP dan sekarang menjadi ke OSS. Kondisi tersebut yang menjadi masalah yang cukup krusial karena di daerah masih banyak yang belum tahu dan paham terkait perubahan perizinan ini.

Meskipun OSS telah diterapkan secara nasional, namun dalam praktiknya dikarenakan ketidaktahuan akan pengetahuan di struktural pemerintah daerah dan kurangnya sosialisasi terkait perubahan perizinan tersebut, sehingga praktiknya sering terjadi ketidak harmonisan peraturan, peraturan saat ini ditransformasi digital melalui OSS dan pelaku usaha dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha atau (izin NIB) tidak serta merta menghapus praktik informal seperti adanya izin “persetujuan lingkungan” atau “persetujuan tetangga” yang dalam hal ini berdasarkan peraturan formal sudah tidak berlaku, namun sampai saat ini masih tetap dijadikan syarat informal oleh aparat atau tokoh masyarakat dalam pengurusan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU).⁵

Kondisi tersebut memberikan implementasi sistem hukum modern seperti OSS belum sepenuhnya mengubah budaya hukum masyarakat dalam hal perizinan. Budaya hukum yang dimaksud mencakup nilai-nilai, kebiasaan, serta sikap sosial terhadap hukum, dan dalam konteks ini menunjukkan masih kuatnya praktik informal di tengah sistem hukum yang berbasis digital.⁶ Budaya hukum ini memberikan cerminan adanya ketimpangan antara hukum normatif yakni aturan-aturan

¹https://www.kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/Evaluasi%20Setahun%20OSS-KPPOD.pdf

² *Ibid.*

³ Kementerian Investasi/BKPM, *Panduan Penggunaan OSS Berbasis Risiko*, 2021.

⁴ Eva Achjani Zulfa, “Transformasi Pelayanan Publik melalui Digitalisasi Perizinan: Studi Implementasi OSS di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 4 (2020): 721–745.

⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Kajian Sistem Perizinan Berusaha*, 2019.

⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam, 2002), 45.

yang berlaku secara tertulis dengan hukum empiris yaitu bagaimana hukum dijalankan dalam kenyataan sosial.⁷ Hal ini memperjelas adanya ketimpangan antara aturan normatif yakni aturan hukum yang berlaku secara sah dan tertulis dengan realitas empiris, yaitu bagaimana hukum dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Masalah birokrasi ini bukan hanya menyangkut sistemnya yang perlu terintegrasi tetapi juga menyangkut perilaku aparat dan masyarakat yang masih terbiasa dengan cara-cara informal. Digitalisasi perizinan melalui OSS akan sulit mencapai tujuannya jika tidak disertai dengan perubahan pola pikir dan budaya hukum para pelaku birokrasi maupun masyarakat.⁸ Fenomena ini menunjukkan kuatnya pengaruh budaya hukum dalam keberlanjutan praktik informal di tengah sistem yang secara desain telah diarahkan untuk transparansi dan efisiensi. Budaya hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Friedman, mencakup elemen sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan institusinya.⁹ Karena kenyataannya, di banyak wilayah, hukum formal belum sepenuhnya menggantikan fungsi norma sosial yang tak tertulis, sehingga aparat dan masyarakat masih merasa sah melakukan negosiasi informal dalam proses perizinan.¹⁰ Selain itu, belum terintegrasinya OSS secara penuh dalam operasional teknis juga membuka ruang terjadinya celah interaksi langsung antara pelaku usaha dengan aparat. Misalnya, verifikasi lapangan atau pengecekan berkas yang masih dilakukan manual di beberapa daerah berkontribusi pada pelestarian praktik informal tersebut,¹¹ ditambah lagi, disharmonisasi antara regulasi pusat dan kebijakan daerah, seperti masih diberlakukannya SKDU di sebagian wilayah, menunjukkan lemahnya sinergi hukum yang seharusnya mendukung pelaksanaan OSS secara nasional¹²

Dalam konteks ini, praktik informal bukan sekadar masalah administratif, melainkan refleksi dari kompleksitas budaya hukum yang tidak serta-merta dapat diubah melalui kebijakan normatif semata. Diperlukan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor budaya hukum yang memperkuat resistensi terhadap perubahan sistem, agar reformasi perizinan melalui OSS benar-benar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana nilai, persepsi, dan kebiasaan hukum masyarakat berkontribusi terhadap bertahannya praktik informal dalam sistem perizinan pasca implementasi OSS.

Berdasarkan uraian di atas, apa faktor-faktor budaya hukum yang mempengaruhi keberlanjutan praktik informal, seperti pungutan liar, dalam sistem perizinan usaha pasca implementasi OSS

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta teori-teori hukum yang relevan. Pendekatan ini difokuskan pada analisis terhadap norma hukum tertulis maupun doktrin yang berkaitan dengan sistem perizinan usaha dan budaya hukum masyarakat dalam praktik pelaksanaannya.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 121.

⁸ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 206.

⁹ Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and the Legal System: A Theory of Law and Social Change* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 15.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Budi Santosa, "Evaluasi Implementasi OSS dalam Perizinan Usaha Mikro dan Kecil," *Jurnal Birokrasi dan Pelayanan Publik* 15, no. 2 (2021): 85–93.

¹² Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Sinkronisasi Peraturan Perizinan Usaha di Daerah* (Jakarta: BPHN, 2022).

- b. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dengan peraturan sebelumnya seperti:

- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dan
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, dan tulisan para ahli hukum.
 3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu menguraikan isi norma hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara sistematis dan logis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

PEMBAHASAN

1. Budaya Hukum Masyarakat Yang Tidak Selaras Dengan Regulasi Formal

Sistem perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS) dirancang untuk mempercepat, menyederhanakan, dan menstandarkan proses perizinan secara nasional, implementasinya masih menghadapi ketidakharmonisan dengan realitas birokrasi lokal yang transaksional. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 menyatakan bahwa OSS adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh lembaga OSS guna mempercepat pelayanan dan meningkatkan kemudahan berusaha.¹³ Namun, di banyak daerah, realitasnya tidak selalu sejalan dengan semangat regulasi. Praktik informal seperti pungutan tidak resmi, peran-peran birokrasi tak tertulis, hingga keterlibatan tokoh masyarakat lokal dalam proses “persetujuan sosial” masih kerap terjadi.¹⁴ Seperti yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman, bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa, tetapi selalu berinteraksi dengan struktur sosial dan kepentingan yang ada di sekitarnya.¹⁵

Bahwa dalam hal ini, dijelaskan juga pada Pasal 13 PP No. 24 Tahun 2018 ditegaskan bahwa pelaku usaha cukup melakukan pendaftaran melalui OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang juga berlaku sebagai TDP, API, dan akses kepabeanaan.¹⁶ Namun dalam praktiknya, masih banyak pemerintah daerah yang menetapkan syarat tambahan seperti SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha) dan rekomendasi lingkungan yang tidak tercantum dalam sistem OSS. Hal ini menunjukkan belum seragamnya pemahaman aparat daerah terhadap reformasi regulasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, “hukum bukan semata-mata norma tertulis, melainkan juga bagian dari dinamika sosial yang terus berubah”.¹⁷

Dalam konteks otonomi daerah, Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Namun batas antara kewenangan pusat dan daerah dalam OSS kerap tidak jelas. Hal ini memunculkan tarik-menarik otoritas antara dua level pemerintahan, yang pada akhirnya membuka celah bagi praktik negosiasi atau bahkan penyimpangan dalam penerbitan izin. Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, konflik antara hukum tertulis dan pelaksanaannya di lapangan terjadi karena lemahnya legal culture dan law enforcement di Indonesia.¹⁹

¹³ Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

¹⁴ Sri Haryati, “Implementasi Sistem OSS dalam Perizinan Berusaha di Daerah,” *Jurnal Administrasi Publik* 14, no. 2 (2021): 133.

¹⁵ Robert B. Seidman, *The State, Law and Development* (New York: St. Martin’s Press, 1978), 92.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2008), 45.

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 171.

Resistensi dari pemerintah daerah terhadap sistem OSS juga mencerminkan aspek sosial-budaya yang belum sepenuhnya menerima otomasi sistem perizinan. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah termasuk dalam urusan perizinan.²⁰ Ketika peran daerah dalam proses ini berkurang akibat otomasi OSS, terjadi kekosongan peran dan insentif yang selama ini dimiliki oleh oknum birokrasi daerah. Hal ini selaras dengan pandangan Max Weber yang menyatakan bahwa birokrasi memiliki kecenderungan mempertahankan status quo demi mempertahankan kewenangan dan sumber daya yang telah dinikmati.²¹

Dari sisi teori Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul "American Law: An Introduction,"²² menguraikan teori tentang Sistem Hukum. Teori ini menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Lebih dalam lagi, sistem hukum dapat dipahami sebagai suatu kesatuan antara peraturan primer yang berbentuk norma kebiasaan dan peraturan sekunder yang berfungsi untuk menentukan validitas serta penerapan norma kebiasaan tersebut.

Adapun komponen sistem hukum sesuai Teori Legal System Lawrence M. Friedman sebagai berikut.

- a. Struktur Hukum (*legal structure*) Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa, "*The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher court are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of.*"

Struktur hukum merupakan pranata yang mendukung tegaknya sistem hukum. Aspek ini mencakup tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum beserta kewenangannya, perangkat hukum, serta proses dan kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum. Lutfil Ansori menjelaskan bahwa jika struktur hukum tidak mampu menggerakkan sistem hukum, hal ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Kondisi tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi budaya hukum dalam masyarakat.

- b. Substansi hukum (*legal substance*) Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa, "*The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine.*"

Substansi hukum merujuk pada keseluruhan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ini mencakup asas-asas dan norma-norma hukum, serta putusan pengadilan yang dijadikan acuan oleh masyarakat dan pemerintah, yang semuanya merupakan produk dari sistem hukum. Meskipun substansi dan struktur hukum merupakan komponen yang nyata dalam sistem hukum, keduanya berfungsi lebih sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja yang langsung digunakan.

- c. Budaya hukum (*legal culture*)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa gangguan pada struktur dan substansi hukum sering kali terjadi karena sifatnya yang statis. Faktor utama yang mempengaruhi adalah lingkungan sosial di luar sistem hukum itu sendiri. Sistem hukum tidak terpisah atau terisolasi, melainkan sangat bergantung pada masukan dari luar. Kekuatan sosial yang berkelanjutan memiliki peran penting dalam merombak tatanan hukum. Mereka melakukan pembaruan, menentukan bagian mana dari hukum yang harus diterapkan dan mana yang

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²¹ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, ed. Guenther Roth and Claus Wittich (Berkeley: University of California Press, 1978), 987.

²² Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, 2nd ed. (New York: W. W. Norton & Company, 1996), 15.

perlu diubah. Fenomena ini dikenal sebagai budaya hukum. Friedman mendefinisikan budaya hukum sebagai “*t is the element of social attitude and value. The phrase “social forces” is itself an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture.*”

Budaya hukum mencakup ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini berhubungan erat dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Sebagai bagian dari sistem hukum, budaya hukum menuntut agar hukum tidak hanya dipandang sebagai sekadar rumusan aturan yang tertulis, tetapi juga sebagai realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor non-hukum, seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap peraturan yang diberlakukan. Dalam kasus OSS, substansi hukumnya sudah diperbarui secara progresif, namun budaya hukumnya belum berkembang seiring. Budaya birokrasi yang transaksional dan kurang adaptif terhadap sistem elektronik menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, seperti yang dikemukakan oleh Erman Rajagukguk, reformasi hukum tidak bisa hanya dilakukan melalui perubahan peraturan, tetapi juga membutuhkan perubahan struktur sosial dan mentalitas aparat penegak hukum.²³

Reformasi perizinan melalui OSS sejatinya merupakan langkah maju dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Namun ketika sistem formal tidak dibarengi dengan penguatan budaya hukum dan penegakan hukum yang tegas terhadap penyimpangan, maka sistem itu berisiko menjadi formalitas belaka. Agar OSS benar-benar berjalan efektif, perlu ada sinergi antara pembuat kebijakan, pelaksana di daerah, serta masyarakat pengguna sistem, disertai pengawasan yang kuat dan konsisten.

2. Ketidakharmonisan Antara Regulasi Perizinan Oss Dengan Realitas Sosial Budaya Birokrasi Yang Transaksional

Reformasi perizinan menjadi langkah awal yang penting untuk meyakinkan para investor bahwa modal yang mereka tanam akan berkembang dalam suasana usaha yang kondusif. Di sini, pelaku usaha dapat menikmati layanan yang praktis, efisien, dan pasti tanpa harus mengorbankan aspek keselamatan lingkungan serta perlindungan sosial, yang merupakan bagian integral dari setiap aktivitas ekonomi. Sistem Online Single Submission (OSS) hadir sebagai pendekatan baru dalam reformasi layanan perizinan usaha di negara kita. Inti dari reformasi berbasis sistem OSS ini adalah untuk mendorong kemudahan dan kepastian dalam berusaha melalui pelayanan yang terstandarisasi.²⁴

Penerapan aplikasi sistem Online Single Submission (OSS) adalah salah satu tujuan utama dibentuknya aplikasi ini, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan perizinan terbaik bagi masyarakat melalui sistem online.²⁵ Kemudian sistem OSS ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan birokrasi dan meningkatkan efisiensi layanan perizinan. Sistem ini secara resmi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana regulasi ini menegaskan bahwa seluruh proses

²³ Erman Rajagukguk, “Reformasi Hukum di Indonesia,” dalam Hukum dan Globalisasi, ed. Hikmahanto Juwana dan M. Budi Djatmiko (Jakarta: Elsam, 2003), 63

²⁴ Robert Endi Jaweng, “EVALUASI SETAHUN OSS Studi Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2018 Di Daerah,” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 6, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

²⁵ Rudiana Nurlaelah, Siti and Jovanscha Qisty Adinda FA, “Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Perizinan Berusaha Wisata Citengah Di Kabupaten Sumedang Tahun 2021,” *Janitra: Jurnal Administrasi Pemerintahan* 3, no. 2 (2023): 215.

perizinan berusaha harus dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS sebagai bentuk reformasi birokrasi.

Dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tersebut disebutkan bahwa: “Perizinan Berusaha dilaksanakan secara elektronik melalui sistem OSS yang terintegrasi secara nasional.” Hal ini menunjukkan bahwa tidak seharusnya ada prosedur manual atau intervensi administratif lokal yang menambah syarat atau langkah di luar sistem elektronik tersebut. Sementara itu, Pasal 14) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, menyatakan bahwa perizinan yang telah diterbitkan melalui OSS sah secara hukum tanpa memerlukan legalisasi atau validasi tambahan dari pejabat atau institusi lainnya, hal Ini menegaskan bahwa hasil dari OSS memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku nasional.²⁶

Dalam praktiknya, pelaku usaha, terutama di sektor mikro dan kecil, masih menghadapi berbagai persyaratan informal yang bersifat lokal, seperti keharusan memperoleh surat rekomendasi dari RT/RW, persetujuan warga, hingga keikutsertaan dalam musyawarah lingkungan. Bahkan, permintaan sejumlah uang dengan dalih “biaya lingkungan” sering muncul sebagai syarat terselubung untuk memproses dokumen perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Tindakan semacam ini jelas bertentangan dengan sistem OSS dan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli), yang tidak memiliki dasar hukum formal.

Fenomena ini mencerminkan adanya jurang antara hukum tertulis (formal law) dan budaya hukum masyarakat (legal culture). Lawrence M. Friedman menekankan bahwa sistem hukum tidak hanya terdiri atas struktur dan substansi, tetapi juga budaya hukum yang mencerminkan bagaimana masyarakat memahami dan merespons hukum.²⁷ Di banyak wilayah, budaya informal yang mengakar kuat membuat praktik pungutan non-formal dianggap sebagai bagian dari prosedur yang lumrah, bukan pelanggaran. Sally Engle Merry dalam kajiannya mengenai legal pluralism menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang memiliki lebih dari satu sistem hukum (formal dan informal), hukum lokal atau kebiasaan bisa jadi lebih dominan dibandingkan hukum negara, terutama dalam praktik administratif.²⁸ Hal ini pula yang terjadi dalam perizinan di Indonesia, di mana hukum formal sering kali dikalahkan oleh “tradisi administratif” lokal yang tidak sesuai dengan prinsip OSS.

Satjipto Rahardjo pernah menekankan bahwa hukum seharusnya tidak sekadar menjadi aturan teknis, melainkan juga harus hidup dan sesuai dengan kebutuhan serta realitas masyarakat^[5]. Maka, solusi atas ketidaksesuaian ini bukan hanya melalui penegakan hukum yang represif, tetapi juga melalui pendidikan hukum dan pendekatan budaya yang menyentuh langsung cara berpikir masyarakat terhadap sistem hukum.²⁹

KESIMPULAN

Sistem perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) telah dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan secara nasional, implementasinya masih menghadapi tantangan besar akibat ketidakharmonisan dengan budaya birokrasi lokal yang bersifat transaksional. Praktik-praktik informal seperti pungutan liar dan syarat administratif tambahan yang tidak tercantum dalam sistem OSS atau peraturan yang berlaku seperti PP No. 5 Tahun 2021 dan PP No. 24 Tahun 2018, serta ketidaksepahaman antara kewenangan pusat dan daerah, mencerminkan kesenjangan antara hukum tertulis dan realitas sosial di lapangan. Oleh

²⁶ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Sally Engle Merry, “Legal Pluralism,” *Law & Society Review* 22, no. 5 (1988): 869–896.

²⁹ *Ibid.*

karena itu, agar sistem OSS dapat berjalan efektif, diperlukan sinergi yang kuat antara pembuat kebijakan, aparat daerah, serta masyarakat, disertai dengan penguatan budaya hukum dan penegakan hukum yang konsisten di semua level pemerintahan.

Budaya hukum lokal yang mengakar kuat, seperti praktik pungutan liar dan persyaratan administratif tambahan di tingkat lokal, bertentangan dengan semangat reformasi yang diusung oleh OSS atau peraturan yang berlaku seperti PP No. 5 Tahun 2021 dan PP No. 24 Tahun 2018. Hal ini menunjukkan adanya gap antara hukum tertulis yang berlaku dan cara masyarakat serta aparat lokal merespons serta melaksanakan hukum. Penyelesaian atas masalah ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga pendidikan hukum yang menyentuh nilai-nilai budaya masyarakat, agar reformasi hukum dapat berjalan efektif dan diterima secara luas.

Saran

1. Adanya peningkatan pendidikan dan literasi hukum masyarakat dan aparat pemerintah, yang dalam hal ini pemerintah perlu secara aktif melakukan sosialisasi dan pendidikan hukum mengenai sistem OSS kepada masyarakat serta aparatur pemerintahan daerah. Pendidikan hukum ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek budaya hukum, agar masyarakat dan birokrasi memahami pentingnya transparansi dan efisiensi dalam perizinan usaha.
2. Adanya penguatan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten, yang dalam hal ini agar praktik pungutan liar dan penambahan syarat yang tidak sesuai ketentuan dapat dihapuskan
3. Adanya sinergi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah, untuk mengatasi ketidaksesuaian antara kewenangan pusat dan daerah, maka dalam hal itu perlu dibangun mekanisme koordinasi yang efektif, dimana pemerintah pusat harus melibatkan pemerintah daerah dalam setiap penyusunan dan implementasi regulasi, agar OSS dapat diterapkan sesuai konteks lokal tanpa mengurangi prinsip transparansi dan kemudahan berusaha.
4. Adanya transformasi budaya hukum lokal melalui pendekatan kultural dimana dalam perubahan budaya hukum tidak dapat dilakukan secara instan, maka dari itu, perlu adanya pendekatan berbasis kearifan lokal, dialog, serta partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk menciptakan penerimaan terhadap sistem OSS, dengan mengkaitkan nilai-nilai lokal agar tidak menimbulkan resistensi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 206.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Sinkronisasi Peraturan Perizinan Usaha di Daerah* (Jakarta: BPHN, 2022).
- Erman Rajagukguk, "Reformasi Hukum di Indonesia," dalam *Hukum dan Globalisasi*, ed. Hikmahanto Juwana dan M. Budi Djatmiko (Jakarta: Elsam, 2003), 63
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 171.
- Kementerian Investasi/BKPM, *Panduan Penggunaan OSS Berbasis Risiko*, 2021.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Kajian Sistem Perizinan Berusaha*, 2019.
- Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, 2nd ed. (New York: W. W. Norton & Company, 1996), 15.
- Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and the Legal System: A Theory of Law and Social Change* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 15.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 15–18.

Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, ed. Guenther Roth and Claus Wittich (Berkeley: University of California Press, 1978), 987.

Robert B. Seidman, *The State, Law and Development* (New York: St. Martin's Press, 1978), 92.

Sally Engle Merry, "Legal Pluralism," *Law & Society Review* 22, no. 5 (1988): 869–896.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2008), 45.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 121.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam, 2002), 45.

Jurnal:

Budi Santosa, "Evaluasi Implementasi OSS dalam Perizinan Usaha Mikro dan Kecil," *Jurnal Birokrasi dan Pelayanan Publik* 15, no. 2 (2021): 85–93.

Eva Achjani Zulfa, "Transformasi Pelayanan Publik melalui Digitalisasi Perizinan: Studi Implementasi OSS di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 4 (2020): 721–745.

Robert Endi Jaweng, "Evaluasi Setahun OSS Studi Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2018 Di Daerah," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 6, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-gene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Rudiana Nurlaelah, Siti and Jovanscha Qisty Adinda FA, "Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Perizinan Berusaha Wisata Citengah Di Kabupaten Sumedang Tahun 2021," *Janitra: Jurnal Administrasi Pemerintahan* 3, no. 2 (2023): 215.

Sri Haryati, "Implementasi Sistem OSS dalam Perizinan Berusaha di Daerah," *Jurnal Administrasi Publik* 14, no. 2 (2021): 133.

Peraturan:

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Web

https://www.kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/Evaluasi%20Setahun%20OSS-KPPOD.pdf